

Menjembatani Kesenjangan Akses *Event*: Perspektif *Multi-Stakeholder* dalam Penyelenggaraan *Event* Inklusif di Indonesia

Bagus Githa Adhitya Muhamad*¹, Any Ariani Noor², Gufroni Sakaril³

Politeknik Pariwisata NHI Bandung¹, Politeknik Negeri Bandung², Universitas Mercu Buana³

Email: baa@poltekpar-nhi.ac.id

Abstract

Event organization in Indonesia still faces significant challenges in ensuring accessibility for persons with disabilities, despite their population reaching more than 22 million people, or approximately 8.5% of the total population. The low participation of persons with disabilities in events indicates a gap between accessibility needs and current event management practices. This study aims to identify accessibility needs and formulate strategies for providing access for persons with disabilities in event organization in Indonesia. This research employs a qualitative approach using Focus Group Discussions (FGDs) involving multiple stakeholders, including disability organizations (PPDI, PERTUNI, and GERKATIN) and event industry actors (ASPERAPI and Backstagers Indonesia). Data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of needs, barriers, and existing practices. The findings reveal that accessibility needs encompass four main aspects: (1) physical access, such as ramps, guiding blocks, and inclusive spatial facilities; (2) information and communication access, including sign language interpreters, visual media, and screen reader technologies; (3) service and participation access, including the involvement of persons with disabilities as active participants and event staff; and (4) safety and comfort access, including evacuation systems and disability-friendly supporting facilities. The main barriers identified include limited awareness among event organizers, lack of standardized operational guidelines, and insufficient policy and infrastructure support. Based on these findings, this study proposes accessibility provision strategies through a multi-stakeholder approach, including strengthening event accessibility standards, enhancing human resource capacity through inclusivity training, utilizing assistive technologies, and fostering collaboration with disability organizations throughout all stages of event management. This study contributes by offering a strategic framework for inclusive event organization that can serve as a reference for government institutions, event organizers, and related stakeholders in promoting accessible and inclusive events in Indonesia.

Keywords: Accessibility; Disability; Event management; Inclusivity; FGD; Multi-stakeholder.

Abstrak

Penyelenggaraan *event* di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meskipun jumlah penyandang disabilitas mencapai lebih dari 22 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi. Rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam *event* menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan aksesibilitas dan praktik penyelenggaraan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas serta merumuskan strategi penyediaan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan *event* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu organisasi penyandang disabilitas (PPDI, PERTUNI, and GERKATIN) serta pelaku industri *event* (ASPERAPI dan Backstagers Indonesia). Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kebutuhan, hambatan, serta praktik yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan aksesibilitas mencakup empat aspek utama, yaitu (1) akses fisik seperti jalur landai, *guiding block*, dan fasilitas ruang yang inklusif; (2) akses informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan juru bahasa isyarat, media visual, serta teknologi pembaca layar; (3) akses layanan dan partisipasi, seperti keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara maupun peserta aktif; serta (4) akses keselamatan dan kenyamanan, termasuk sistem evakuasi dan fasilitas pendukung yang ramah disabilitas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman penyelenggara terhadap kebutuhan disabilitas, keterbatasan standar operasional, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan infrastruktur. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi penyediaan akses melalui pendekatan *multi-stakeholder* yang meliputi penguatan standar aksesibilitas *event*, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia melalui pelatihan inklusivitas, pemanfaatan teknologi pendukung, serta kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan penyelenggaraan *event*. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka strategis penyelenggaraan *event* inklusif yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah, penyelenggara *event*, dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan *event* yang aksesibel dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Disabilitas; *Event*; Inklusivitas; FGD; *Multi-stakeholder*.

A. PENDAHULUAN

Event merupakan sebuah kegiatan yang direncanakan dan diselenggarakan sesuai dengan jenis karakteristiknya melalui serangkaian acara utama dan pendukung untuk memenuhi tujuan penyelenggaraannya (Muhamad, 2023). Penyelenggaraan *event* sebagai bagian dari industri kreatif dan pariwisata saat ini terus mengalami perkembangan pesat, baik dari segi skala, kompleksitas, maupun keragaman pengunjung. *event* tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, *event* memiliki potensi strategis dalam mendorong inklusi sosial dan memperluas partisipasi publik dalam aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan *event* masih menghadapi tantangan dalam memastikan aksesibilitas bagi seluruh individu, khususnya penyandang disabilitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa isu akses, disabilitas, dan inklusi belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik industri *event*, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaannya (Darcy, 2012; Gillovic & McIntosh, 2020).

Secara global, isu inklusivitas dan aksesibilitas telah menjadi perhatian utama dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata dan *event*, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya penyediaan layanan yang setara (World Health Organization, 2011; United Nations World Tourism Organization, 2016; Darcy et al., 2010). Komitmen terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang dikeluarkan oleh *United Nations* (2006) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Prinsip ini juga diperkuat dalam *Global Code of Ethics for Tourism* yang dikeluarkan oleh *World Tourism Organization* (1999), yang menegaskan bahwa akses terhadap pengalaman wisata dan *event* harus tersedia secara adil dan tanpa diskriminasi bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, urgensi isu ini diperkuat oleh data global yang menunjukkan besarnya populasi penyandang disabilitas. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (2023) dan *World Bank* (2023), sekitar 1,3 miliar orang di dunia atau setara dengan 16% populasi global hidup dengan suatu bentuk disabilitas. Angka ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok populasi yang sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan dalam perencanaan layanan publik, termasuk penyelenggaraan *event*. Tingginya jumlah tersebut sekaligus mempertegas bahwa aksesibilitas bukanlah isu marginal, melainkan kebutuhan utama dalam menciptakan layanan yang inklusif secara global.

Dalam perspektif konseptual, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi individu, tetapi sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan yang tidak aksesibel. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka yang dikembangkan oleh *World Health Organization* dalam *World Report on Disability* (2011), yang mengklasifikasikan disabilitas ke dalam berbagai kategori seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Keragaman kategori ini menunjukkan bahwa

kebutuhan aksesibilitas bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam penyelenggaraan *event*.

Sejumlah penelitian internasional menegaskan bahwa aksesibilitas dalam konteks *event* dan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, komunikasi, serta pengalaman pengguna secara menyeluruh. Konsep *Accessible Tourism* menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan interaksi antara individu dengan lingkungan dan sistem layanan (Darcy et al., 2010). Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas dalam *event* harus dipandang sebagai suatu sistem terpadu, bukan sekadar penyediaan fasilitas tambahan.

Lebih lanjut, dalam perspektif industri, penyandang disabilitas merupakan segmen pasar yang signifikan namun masih sering terabaikan dalam perencanaan layanan (Buhalis & Darcy, 2011). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pasar dan praktik penyelenggaraan *event*, yang sekaligus membuka peluang strategis bagi pengembangan *event* yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi pengalaman pengunjung, tingkat aksesibilitas yang dirasakan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengalaman dan kepuasan dalam mengikuti *event* (Packer & Ballantyne, 2016). Ketika hambatan akses masih terjadi, maka pengalaman yang diperoleh menjadi tidak optimal dan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pengunjung.

Selain berdampak secara sosial, keterbatasan aksesibilitas juga memiliki implikasi ekonomi. Kegagalan dalam menyediakan akses yang memadai dapat menyebabkan eksklusi pasar serta hilangnya potensi ekonomi dalam industri *event* dan pariwisata (Darcy & Buhalis, 2011). Hal ini menegaskan bahwa aksesibilitas bukan hanya isu sosial, tetapi juga isu strategis dalam pengelolaan *event*.

Dalam konteks penyelenggaraan *event*, prinsip non-diskriminasi menjadi landasan penting dalam menciptakan pengalaman yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara *event* memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak adanya hambatan partisipasi bagi individu dengan berbagai kondisi, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, *event* harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya pembatasan (Hind et al., 2019).

Dalam konteks tata kelola *event*, pendekatan berbasis *stakeholder* menjadi faktor kunci dalam menciptakan penyelenggaraan yang inklusif. Keberhasilan *event* sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder* yang terlibat (Getz & Page, 2016). Oleh karena itu, keterlibatan langsung penyandang disabilitas sebagai *stakeholder* utama menjadi krusial untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan implementasi.

Pendekatan partisipatif ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dapat meningkatkan kualitas desain layanan serta mengurangi kesenjangan implementasi (Small & Darcy, 2010). Hal ini memperkuat relevansi penggunaan metode *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, perkembangan literatur *Inclusive Event Management* menegaskan bahwa inklusivitas harus diintegrasikan dalam seluruh siklus manajemen *event*, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi (Mair & Whitford, 2013). Selain itu, aksesibilitas informasi dan komunikasi juga menjadi aspek krusial, terutama bagi penyandang disabilitas sensorik, yang seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi yang jelas dan aksesibel.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan terhadap aksesibilitas telah bergeser dari sekadar pemenuhan standar menuju pendekatan berbasis pengalaman pengguna (*user-centered approach*), yang menempatkan kebutuhan individu sebagai fokus utama dalam desain layanan.

Sebagai praktik nyata, sejumlah acara internasional telah mengimplementasikan prinsip inklusivitas secara komprehensif. Salah satu contoh adalah konser Coldplay dalam tur *Music of the Spheres*, yang menyediakan berbagai fasilitas aksesibilitas seperti area khusus pengguna kursi roda, *sign language* interpreter, *sensory-friendly space*, serta teknologi *wearable* (SUBPAC) bagi penyandang tunarungu untuk merasakan getaran musik. Selain itu, event besar seperti Olympic Games dan Paralympic Games juga telah lama menerapkan prinsip desain universal dan aksesibilitas menyeluruh dalam penyelenggaraannya. Implementasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas dapat menjadi bagian integral dari pengalaman *event*, bukan sekadar tambahan fasilitas.

Dalam konteks Indonesia, besarnya populasi penyandang disabilitas juga menunjukkan urgensi yang tidak kalah penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), terdapat sekitar 22,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 8,5% dari total populasi yang merupakan penyandang disabilitas. Angka ini menegaskan bahwa kelompok ini merupakan bagian signifikan dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk *event*. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap *event* masih belum sepenuhnya inklusif, baik dari sisi fasilitas fisik, informasi, maupun layanan pendukung.

Di Indonesia, komitmen terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak atas aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan sosial dan budaya. Implementasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan *event* di Indonesia, penerapan prinsip inklusivitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman penyelenggara, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan.

Jika dibandingkan dengan praktik global, beberapa *event* internasional telah menunjukkan standar inklusivitas yang lebih matang dan sistematis. Sementara itu, di Indonesia, implementasi aksesibilitas dalam *event* masih cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam manajemen *event*. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengembangkan *event* yang inklusif di Indonesia.

Upaya mewujudkan pariwisata dan *event* yang inklusif di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah terus mendorong strategi peningkatan aksesibilitas di sektor publik (Zahra & Kholid, 2025). Namun, literatur yang ada saat ini masih didominasi oleh kajian aksesibilitas pada objek wisata statis atau destinasi secara umum (Herdiana & Mursalim, 2022). Meskipun evaluasi pada *event* spesifik seperti festival musik mulai bermunculan dan mengungkap perlunya penyesuaian fasilitas serta pelatihan staf (Fiona et al., 2024), namun studi tersebut masih bersifat kasuistik pada satu acara saja. Terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi makro yang komprehensif dengan melibatkan multi-stakeholder guna menyinkronkan standar pelayanan antara organisasi disabilitas dan pelaku industri *event* di tingkat nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa aksesibilitas dalam penyelenggaraan *event* merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, pengalaman pengguna, serta tata kelola *stakeholder*. Meskipun berbagai penelitian internasional telah mengkaji isu ini secara komprehensif, kajian yang secara khusus mengangkat implementasi inklusivitas dalam konteks *event* di Indonesia, terutama dengan pendekatan *multi-stakeholder*, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui

pendekatan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam industri *event* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif untuk memahami secara mendalam kebutuhan serta strategi penyediaan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan *event* di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali perspektif, pengalaman, serta pemaknaan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap isu aksesibilitas yang bersifat kompleks dan kontekstual (P. Creswell C. N. & Creswell, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran variabel, tetapi pada pemahaman fenomena secara holistik.

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Focus Group Discussion (FGD). FGD dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dinamis antar partisipan sehingga dapat mengungkap berbagai sudut pandang, kesepakatan, maupun perbedaan persepsi terkait aksesibilitas dalam penyelenggaraan *event* (Krueger & Casey, 2015). FGD dilakukan sebanyak 4 kali dari rentang tahun 2022 hingga 2025, dengan fokus jenis *event* yang berbeda di setiap tahunnya, yaitu: pameran, konser musik, festival dan olahraga. Melalui diskusi kelompok, penelitian ini mampu menangkap konstruksi sosial yang terbentuk di antara para stakeholder dalam konteks industri *event*.

Pemilihan partisipan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan stakeholder utama dalam ekosistem *event* di Indonesia. Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas, dan asosiasi industri *event* yang mewakili praktisi yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan *event*. Secara spesifik, partisipan melibatkan perwakilan dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yaitu Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) yaitu Ketua DPD Jawa Barat, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) yaitu Ketua DPD Jawa Barat, Backstagers Indonesia yaitu Ketua dan Sekretaris DPD Jawa Barat, serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI) yaitu Ketua dan Sekretaris DPD Jawa Barat. Keterlibatan *multi-stakeholder* ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan memperkuat validitas temuan.

Tabel 1
Profil Partisipan

No	Kode	Posisi	Asosiasi	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	P1	Ketua Dewan Pertimbangan	PPDI	60	L	S2
2	P2	Ketua Umum	PPDI	58	L	S2
3	P3	Ketua DPD	PERTUNI	57	L	S1
4	P3	Ketua DPD	GERKATIN	52	L	S1

2018-2023

No	Kode	Posisi	Asosiasi	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
5	P4	Ketua DPD	GERKATIN 2023-2028	45	L	S1
6	P5	Ketua DPD	Backstagers	56	L	S1
7	P6	Sekjen DPD	Backstagers	46	L	S1
8	P7	Ketua DPD	ASPERAPI	60	L	S2
9	P8	Sekjen DPD	ASPERAPI	56	L	S1

Sumber: Focus Group Discussion, (2022-2025)

Pengumpulan data dilakukan melalui pelaksanaan FGD yang difasilitasi secara terstruktur dengan panduan diskusi (*discussion guide*) yang telah disusun berdasarkan kajian literatur terkait aksesibilitas dan manajemen *event*. Diskusi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu 1. identifikasi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam *event*, 2. tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta 3. strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan *event* yang inklusif. Seluruh proses diskusi direkam dan ditranskripsikan untuk memastikan kelengkapan data.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Braun & Clarke (2006), yaitu: 1. familiarisasi dengan data, 2. pembuatan kode awal, 3. pencarian tema, 4. peninjauan tema, 5. pendefinisian dan penamaan tema, serta 6. penyusunan laporan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi pola-pola makna yang muncul dari data kualitatif secara sistematis dan mendalam.

Untuk menjaga keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi, antara lain triangulasi sumber melalui keterlibatan berbagai stakeholder, *member checking* untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pandangan partisipan, serta *audit trail* dalam proses analisis data. Selain itu, peneliti juga menjaga reflektivitas dengan menyadari potensi bias selama proses penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek etika penelitian. Seluruh partisipan diberikan informasi terkait tujuan penelitian serta hak mereka sebagai responden, dan persetujuan partisipasi diperoleh sebelum pelaksanaan FGD. Kerahasiaan identitas partisipan juga dijaga dengan tidak mencantumkan informasi personal dalam pelaporan hasil penelitian.

Melalui pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang mendalam, kontekstual, serta relevan dalam merumuskan strategi penyediaan aksesibilitas yang inklusif dalam penyelenggaraan *event* di Indonesia.

C. HASIL DAN ANALISIS

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengungkap bahwa isu aksesibilitas dalam penyelenggaraan *event* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik. Melalui analisis tematik, data yang diperoleh menunjukkan empat dimensi utama aksesibilitas, yaitu akses fisik, akses informasi dan komunikasi, akses layanan dan partisipasi, serta akses keselamatan dan kenyamanan, yang saling berkaitan dengan berbagai hambatan dan strategi implementasi.

Tabel 2

Hasil Analisis Tematik FGD Berdasarkan Aspek Aksesibilitas dan Perspektif *Stakeholder*

Kode Partisipan	Stakeholder	Aspek	Sub-Aspek	Ringkasan Temuan
P1	PPDI	Akses Fisik	Jalur Landai & <i>Guiding Block</i>	Fasilitas fisik seperti <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> belum tersedia secara merata dan sering tidak sesuai standar.
P2	PPDI	Akses Layanan & Partisipasi	Keterlibatan Disabilitas	Penyandang disabilitas belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan <i>event</i> .
P2	PPDI	Hambatan	Pemahaman Penyelenggara	Kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap kebutuhan disabilitas menjadi kendala utama.
P3	PERTUNI	Akses Fisik	Navigasi Tunanetra	Minimnya penunjuk arah berbasis taktil dan audio bagi pengunjung tunanetra.
P3	PERTUNI	Akses Informasi & Komunikasi	Media Aksesibel	Informasi <i>event</i> belum tersedia dalam format audio atau <i>screen reader friendly</i> .
P3	PERTUNI	Hambatan	Akses Informasi	Keterbatasan akses terhadap informasi sebelum dan selama <i>event</i> berlangsung.
P3	GERKATIN	Akses Informasi & Komunikasi	Bahasa Isyarat	Tidak tersedianya juru bahasa isyarat dalam sebagian besar <i>event</i> .
P4	GERKATIN	Akses Layanan & Partisipasi	Interaksi Komunikasi	Hambatan komunikasi antara panitia dan peserta tuli.
P3	GERKATIN	Hambatan	Inklusi Sosial	Kurangnya kesadaran akan kebutuhan komunikasi inklusif.
P5	Backstagers Indonesia	Akses Fisik	Desain <i>Venue</i>	<i>Event Venue</i> umumnya belum mengadopsi prinsip universal design secara menyeluruh.
P6	Backstagers Indonesia	Akses Layanan & Partisipasi	SOP Pelayanan	Belum tersedia SOP pelayanan inklusif bagi pengunjung disabilitas.
P6	Backstagers Indonesia	Akses Keselamatan & Kenyamanan	Evakuasi Darurat	Prosedur evakuasi belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.
P5	Backstagers Indonesia	Hambatan	SDM Event	Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami aksesibilitas.
P4	Backstagers Indonesia	Strategi	Pelatihan SDM	Perlunya pelatihan inklusivitas bagi tim penyelenggara <i>event</i> .
P7	ASPERAPI	Akses Fisik	Infrastruktur Pameran	Infrastruktur <i>venue</i> pameran belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Kode Partisipan	Stakeholder	Aspek	Sub-Aspek	Ringkasan Temuan
P7	ASPERAPI	Akses Informasi & Komunikasi	Informasi Visual	Informasi masih dominan visual tanpa alternatif akses.
P7	ASPERAPI	Akses Keselamatan & Kenyamanan	Fasilitas Pendukung	Fasilitas pendukung seperti area khusus masih terbatas.
P8	ASPERAPI	Hambatan	Standarisasi	Belum adanya standar nasional terkait <i>event</i> inklusif.
P8	ASPERAPI	Strategi	Standar & Regulasi	Perlunya penyusunan standar aksesibilitas <i>event</i> secara nasional.

Sumber: Focus Group Discussion, (2022-2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam penyelenggaraan *event* mencakup empat aspek utama, yaitu akses fisik, akses informasi dan komunikasi, akses layanan dan partisipasi, serta akses keselamatan dan kenyamanan. Keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan sejauh mana *event* dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Temuan ini memperkuat konsep *accessible tourism* yang dikemukakan oleh Darcy et al (2010) yang menegaskan bahwa aksesibilitas tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai pendekatan yang bersifat menyeluruh.

Pada aspek akses fisik, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar *event venue* di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Fasilitas seperti jalur landai, guiding block, serta ruang gerak bagi pengguna kursi roda seringkali belum tersedia secara optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, fasilitas yang tersedia belum dirancang sesuai prinsip universal design, sehingga penggunaannya menjadi kurang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa penyediaan akses fisik masih bersifat simbolis dan belum terintegrasi dalam perencanaan *event* secara menyeluruh.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Buhalis dan Darcy (2011) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang kurang diperhatikan dalam perencanaan layanan. Dalam konteks *event*, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara masih cenderung berfokus pada aspek estetika dan kapasitas pengunjung, dibandingkan dengan aspek aksesibilitas. Padahal, tanpa akses fisik yang memadai, penyandang disabilitas akan mengalami keterbatasan dalam mengakses seluruh rangkaian kegiatan *event*.

Selanjutnya, pada aspek akses informasi dan komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan dalam memperoleh informasi. Ketiadaan juru bahasa isyarat, minimnya penggunaan teks (*subtitle/caption*), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pembaca layar menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas sensorik. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam *event* masih belum dirancang secara inklusif.

Temuan ini mendukung pendapat Packer dan Ballantyne (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pengalaman pengunjung sangat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi. Ketika informasi tidak dapat diakses secara optimal, maka pengalaman yang diperoleh juga menjadi terbatas. Dalam konteks ini, aksesibilitas informasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai faktor utama dalam menentukan kualitas pengalaman pengunjung.

Lebih lanjut, pada aspek layanan dan partisipasi, penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih lebih sering diposisikan sebagai penerima layanan, bukan sebagai bagian aktif dalam penyelenggaraan *event*. Keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan,

maupun evaluasi *event* masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat *top-down* dan belum mengakomodasi perspektif pengguna secara langsung.

Padahal, menurut Small dan Darcy (2010) keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan implementasi. Dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif, penyelenggara *event* dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan yang sebenarnya, sehingga desain *event* menjadi lebih tepat sasaran.

Pada aspek keselamatan dan kenyamanan, penelitian ini menemukan bahwa sistem evakuasi darurat yang ramah disabilitas masih belum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan *event*. Jalur evakuasi yang tidak aksesibel, kurangnya sistem peringatan visual, serta minimnya petugas yang terlatih menjadi indikator bahwa aspek keselamatan belum dirancang secara inklusif. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko bagi penyandang disabilitas dalam situasi darurat.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keselamatan dalam *event* masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merancang sistem keselamatan yang inklusif, sehingga seluruh pengunjung dapat merasa aman dan nyaman selama mengikuti *event*.

Selain mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam implementasinya. Rendahnya pemahaman penyelenggara terhadap konsep inklusivitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas penyediaan aksesibilitas. Banyak penyelenggara yang masih menganggap aksesibilitas sebagai aspek tambahan, bukan sebagai bagian inti dari perencanaan *event*.

Selain itu, keterbatasan standar operasional juga menjadi kendala dalam implementasi aksesibilitas. Hingga saat ini, belum terdapat pedoman yang komprehensif dan terstandarisasi terkait penyelenggaraan *event* inklusif di Indonesia. Hal ini menyebabkan implementasi aksesibilitas menjadi tidak konsisten dan bergantung pada inisiatif masing-masing penyelenggara.

Dukungan kebijakan dan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi aksesibilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi terkait penyandang disabilitas, implementasinya dalam konteks *event* masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengembangan *event* inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat Getz dan Page (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan *event* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai *stakeholder*. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara *event*, dan organisasi penyandang disabilitas menjadi kunci dalam menciptakan *event* yang inklusif.

Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan *event*. Dengan melibatkan berbagai pihak, penyelenggara *event* dapat mengidentifikasi kebutuhan secara lebih akurat dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi pengembangan *event* inklusif di Indonesia perlu dirancang secara sistematis melalui pendekatan *multi-stakeholder*. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan aksesibilitas dan implementasi di lapangan.

Pertama, penguatan standar aksesibilitas menjadi langkah fundamental dalam memastikan konsistensi implementasi *event* inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional yang jelas menyebabkan penyediaan aksesibilitas bersifat tidak merata. Oleh karena

itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang mengacu pada prinsip universal design serta praktik internasional, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara *event* di Indonesia.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan inklusivitas menjadi strategi yang tidak kalah penting. Rendahnya pemahaman penyelenggara terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa isu aksesibilitas belum terinternalisasi dalam praktik profesional. Pelatihan yang berkelanjutan, baik bagi panitia, relawan, maupun tenaga pendukung, dapat meningkatkan sensitivitas dan kompetensi dalam menyediakan layanan yang inklusif.

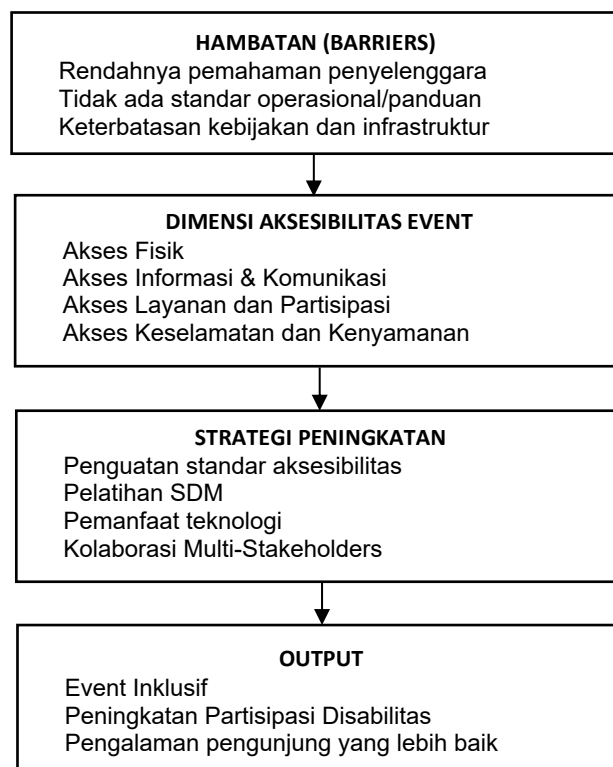
Ketiga, pemanfaatan teknologi pendukung aksesibilitas merupakan peluang yang dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan *event*. Teknologi seperti *live captioning*, aplikasi berbasis *screen reader*, serta sistem informasi digital yang aksesibel dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, integrasi solusi digital menjadi strategi yang relevan dan adaptif.

Keempat, kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa kebutuhan yang diakomodasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih terbatas, sehingga diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberterimaan *event* di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen *event*, strategi ini sejalan dengan pendekatan *multi-stakeholder* yang dikemukakan oleh Getz dan Page (2016) di mana keberhasilan *event* sangat ditentukan oleh sinergi antar pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, aksesibilitas tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis tematik yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam penyelenggaraan *event* tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai dimensi, hambatan, dan strategi yang saling berkaitan. Temuan ini mengindikasikan perlunya suatu kerangka konseptual yang mampu menggambarkan hubungan antar komponen tersebut secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual penyelenggaraan *event* inklusif berbasis aksesibilitas dan pendekatan *multi-stakeholder*, yang menggambarkan keterkaitan antara hambatan yang dihadapi, dimensi aksesibilitas, strategi yang diperlukan, serta dampak yang dihasilkan dalam penyelenggaraan *event*.



Gambar 1

Model Penyelenggaraan *Event* Inklusif berbasis Aksesibilitas
Sumber: Olahan Peneliti, 2026

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas dalam *event* tidak lagi dapat dipahami sebagai penyediaan fasilitas tambahan, melainkan sebagai elemen inti yang menentukan kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan suatu *event*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan aksesibilitas mencerminkan suatu sistem yang saling terhubung, di mana aspek fisik, informasi dan komunikasi, layanan dan partisipasi, serta keselamatan dan kenyamanan berperan secara simultan dalam membentuk pengalaman pengunjung. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan *event* inklusif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam mengintegrasikan berbagai dimensi aksesibilitas secara menyeluruh.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa permasalahan utama bukan semata pada keterbatasan fasilitas, melainkan pada belum terbangunnya sistem dan tata kelola aksesibilitas yang terstruktur. Kesenjangan antara pemahaman dan implementasi, keterbatasan standar operasional, serta belum optimalnya kolaborasi antar stakeholder menjadi faktor yang menghambat terwujudnya *event* yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju *event* inklusif memerlukan perubahan pendekatan, dari yang bersifat parsial menjadi lebih sistemik dan kolaboratif.

Sebagai kontribusi, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan *multi-stakeholder* dalam pengembangan *event* inklusif, di mana pemerintah, penyelenggara *event*, dan organisasi penyandang disabilitas memiliki peran yang saling melengkapi. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa inklusivitas bukan hanya isu sosial, tetapi juga memiliki nilai

strategis dalam meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung serta memperluas jangkauan pasar dalam industri *event*.

Selain itu, penelitian di masa mendatang juga dapat diarahkan pada studi komparatif antara *event* di Indonesia dan negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan *event* inklusif. Penggunaan teknologi aksesibilitas, seperti aplikasi berbasis digital dan sistem informasi inklusif, juga menjadi area yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada pendekatan kualitatif yang berfokus pada persepsi dan pengalaman *stakeholder*, sehingga belum dapat mengukur secara kuantitatif tingkat aksesibilitas *event*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen pengukuran aksesibilitas yang lebih terstandarisasi serta melakukan pengujian model secara kuantitatif untuk memperoleh generalisasi yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan model implementatif *event* inklusif yang saat ini sedang dalam tahap konseptualisasi lebih lanjut, khususnya dalam bentuk kerangka kerja kolaboratif berbasis *stakeholder*. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi penyelenggara *event* dalam merancang dan mengelola *event* yang lebih inklusif di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan *event* inklusif di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, *event* tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang adil dan aksesibel bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik disabilitas Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buhalis, D., & Darcy, S. (2011). *Accessible Tourism: Concepts and Issues*. Multilingual Matters & Channel View Publications. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/jj.29308438>
- Creswell, P., C. N., & Creswell, P., C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Darcy, S. (2012). Disability, access, and inclusion in the Event industry: A call for inclusive Event research. *Event Management*, 16(3), 343–354. <https://doi.org/10.3727/152599512X13461660017475>
- Darcy, S., & Buhalis, D. (2011). Introduction: From Disabled Tourists to Accessible Tourism. In D. Buhalis & S. Darcy (Ed.), *Accessible Tourism: Concepts and Issues*. In D. Buhalis & S. Darcy (Eds.), *Concepts and Issues* (pp. 1–20). Channel View Publications. <https://doi.org/10.21832/9781845411626-004>
- Darcy, S., Cameron, B., & Pegg, S. (2010). Accessible tourism and sustainability: A discussion and case study. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(4), 515–537. <https://doi.org/10.1080/09669581003690668>
- Fiona, Bagus Githa Adhitya M, & Cucu Kurniati. (2024). Penyediaan Akses bagi Penyandang Disabilitas pada Penyelenggaraan Tau-Tau Fest. *Journal of Event, Travel and Tour Management*, 51–59. <https://doi.org/10.34013/jett.v4i1.1637>
- Getz, D., & Page, S. J. (2016). *Event studies: Theory, research, and policy for planned Events* (Third edition). Routledge.
- Gillovic, B., & McIntosh, A. (2020). Accessibility and Inclusive Tourism Development: Current State and Future Agenda. *Sustainability*, 12(22), 9722. <https://doi.org/10.3390/su12229722>
- Herdiana, D., & Mursalim, S. W. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(3), 122–134. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i3.785>

- Hind, D., Disimulacion, M. A. T., Fernandez, K., Lin, K.-W. E., Sharma, A., & Suroto, P. Z. (2019). *International Best Practice in Event Management based on The APIEM Certified Event Manager*. Prasetiya Mulya Publishing.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.) (5th ed.). SAGE Publications.
- Mair, J., & Whitford, M. (2013). An exploration of Events research: Event topics, themes and emerging trends. *International Journal of Event and Festival Management*, 4(1), 6–30. <https://doi.org/10.1108/17582951311307485>
- Muhamad, Bagus Githa Adhitya., (2023). Festival Event Olah Raga Internasional. In Sahala Martua Solin (ed). *Perencanaan dan Pengelolaan Event Olahraga*. (Edisi ke-1), pp.219-240. CV, Media Sains Indonesia.
- Packer, J., & Ballantyne, R. (2016). Conceptualizing the Visitor Experience: A Review of Literature and Development of a Multifaceted Model. *Visitor Studies*, 19(2), 128–143. <https://doi.org/10.1080/10645578.2016.1144023>
- Small, J., & Darcy, S. (2010). Understanding tourist experience through embodiment: The contribution of critical tourism and disability studies. In D. Buhalis & S. Darcy (Eds.), *Concepts and Issues* (pp. 73–97). Channel View Publications. <https://doi.org/10.21832/9781845411626-008>
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. United Nations.
- World Bank. (2023). *Disability inclusion overview*. World Bank.
- World Health Organization. (2011). *World report on disability*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. World Health Organization.
- World Tourism Organization. (1999). *Global code of ethics for tourism*. UNWTO.
- Zahra, A.S., & Kholid, Anwar (2025). Menuju Pariwisata Inklusif: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Destinasi Wisata. *Jurnal Caraka Prabhu*. <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i2.3543>